

SISTEM PEMERINTAHAN *SOFT-AUTORITHARIAN* SINGAPURA DI TENGAH ARUS DEMOKRASI

Muhammad Imam Akbar Hairi¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30128
Email : akbar_hairi27@yahoo.co.id¹⁾

ABSTRACT

The aim of this paper is to analyze about soft-authoritarian model of Singapore system politics. We show that even modern state like Singapore, using market economy system doesn't effect to democratize in government politics. Although middle class growing so fast, but didn't make them to push government adopting democracy system politics. In consequence more educated people in Singapore, didn't lead to democratization in politics. We then check this because confucianism become the prior of the political culture in Singapore. Confucianism became the soul of government politics of Singapore. We also show that people of Singapore didn't care about democracy in politics because of the government provides public facility and entertainment really outstanding.

Keyword : Democracy, Singapore, Soft-Authoritarian.

1. Pendahuluan

Perkembangan arus demokratisasi yang semakin luas dan tak terelakkan terutama memasuki era globalisasi menjadikan sistem politik yang tidak memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai sistem politik demokrasi 'barat' menjadi tidak lagi relevan dan populer di mata masyarakat di setiap negara modern di dunia. Terutama dapat dilihat semakin banyak rezim-rezim nondemokratis yang runtuh akibat tuntutan dari warga negaranya untuk mendorong demokratisasi di dalam kehidupan politik seperti di beberapa negara Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, Peru, Chile, Kolombia, Kuba, Republik Dominika, begitu pula di Indonesia, dan yang terbaru adalah di Timur Tengah seperti Mesir, Tunisia, Suriah, Yaman dan Libia.

Ada dua faktor yang mendorong tuntutan demokratisasi di seluruh dunia yaitu pertama, faktor internal dari kondisi pemerintahan yang bersifat otoritarian mendorong terjadinya penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan meluasnya korupsi, kolusi, nepotisme, pelanggaran HAM oleh jajaran elit pemerintahan yang diikuti dengan kemiskinan, pengangguran dan mahalnya kebutuhan pokok masyarakat meskipun di dalam kasus tertentu faktor tidak terjadinya pergantian kepemimpinan melalui mekanisme demokrasi menjadi faktor yang utama seperti di Libya.

Kedua, faktor eksternal yaitu kemajuan teknologi transportasi dan informasi berpengaruh secara signifikan di dalam mobilisasi penduduk dan arus komunikasi penduduk sehingga setiap warga negara menjadi semakin sensitif di dalam mengikuti setiap perkembangan dan peristiwa yang terjadi di dalam dan luar negeri. Setiap warga negara menjadi cepat memahami apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan terhadap

pemerintahan dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat.

Perkembangan arus demokratisasi dewasa ini digolongkan oleh Samuel Huntington sebagai gelombang demokratisasi ketiga yang tumbangnya rezim otoriter yakni sistem satu partai, rezim militer, dan kediktatoran perorangan.¹ Meskipun Huntington juga meramalkan bahwa sistem otoritarian bisa kembali berkuasa apabila pemerintahan sipil tidak mampu membawa situasi yang kondusif dan perbaikan di dalam kehidupan politik negara, hal ini disebabkan kekuatan-kekuatan lama seperti kekuatan lama rezim otoritarian terdahulu selalu mengawasi setiap kesempatan untuk bisa mengambil kembali kekuasaan sipil yang demokratis.²

Namun tidak semua rezim pemerintahan otoriter di dunia mengalami keruntuhan dan tidak mendapatkan legitimasi dari warga negaranya yang menuntut demokratisasi di seluruh bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahkan di dalam negara-negara tertentu gerakan protes dan demonstrasi sangat rendah dilakukan oleh rakyatnya meskipun di dalam hal-hal tertentu faktor negara yang melakukan kebijakan membatasi gerak dan perilaku masyarakatnya ikut mempengaruhi rendahnya demonstrasi dan protes dari masyarakatnya.

Hal ini dapat kita lihat terutama di negara-negara Asia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan dan pesat dengan mempertahankan sistem politik pemerintahan yang otoritarian seperti China, Singapura, dan Malaysia. Merupakan hal yang menarik untuk dibahas terutama terkait konteks pembangunan politik ideologi demokrasi 'barat' menjadi ideologi yang dominan, tidak hanya dianggap sebagai satu-satunya ideologi yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam kehidupan politik negara modern. Namun juga demokrasi merupakan satu-satunya ideologi yang paling

¹ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti, 2000. Hlm. 142.

² Samuel P. Huntington, *ibid*, hlm. 153

dianggap 'baik' diantara pilihan yang terburuk. Menjadi kontras apabila melihat konteks beberapa negara di Asia contohnya Singapura, sistem pemerintahan otoritarian merupakan pilihan yang 'terbaik' bila dibandingkan model demokrasi 'barat'.

Tinjauan Pustaka

Rezim otoritarian memiliki dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu¹:

1. Rezim otoritarian personal yaitu : *"the leader, who usually came to power as an officer in a military coup or as the leader of a single-party government, had consolidated control over policy and recruitment in his own hands, in the process marginalizing other officers' influence and/or reducing the influence and functions of the party."*

"Seorang Pemimpin, yang pada umumnya mendapatkan kekuasaan sebagai pejabat militer yang melakukan kudeta atau sebagai pemimpin dari partai tunggal pemerintahan, yang telah mengkonsolidasikan pengawasan terhadap kebijakan dan rekrutmen (politik) atas keputusannya (pribadi) sebagai proses marginalisasi terhadap pengaruh pejabat/elit lainnya dan/atau mengurangi pengaruh dan fungsi dari partai."

Rezim otoritarian personal dapat dipahami sebagai rezim yang kekuasaan atas segala kebijakan dan proses keputusan politik ditentukan oleh keputusan individu dari seorang pemimpin yang seringkali pemimpin tersebut memiliki latar belakang sebagai pejabat militer dan mendapatkan kekuasaan pemerintahan dengan cara inkonstitusional yakni kudeta dan mengurangi serta mengesampingkan semua peranan oposisi dan partai.

2. Rezim partai tunggal yaitu *"regime which the party has some influence over policy, controls most access to political power and government jobs, and has functioning local level government, including situations in which but all one party are officially excluded from political process and also situations in which other parties may organize and participate, but these other parties are (through formal or informal restrictions on their activities and their access to political authority) effectively excluded."*²

"rezim dimana partai memiliki pengaruh terhadap kebijakan, kontrol terhadap hampir keseluruhan akses kekuasaan politik dan pekerjaan pemerintahan dan memiliki fungsi di dalam level pemerintahan lokal termasuk situasi dimana partai selain partai tunggal tidak dilibatkan di dalam proses politik dan situasi dimana partai lain boleh dibentuk dan berpartisipasi namun (melalui hambatan formal dan informal terhadap

aktifitasnya dan akses terhadap otoritas politik) secara efektif tidak berperan/dilibatkan.

*"In Africa and Asia, single-party dominance has often justified as a means to preserve national unity and in effect, to protect the people from themselves by reducing the threat from ethnic or tribal rivalries, or simply to free government from political squabbling of all kinds as it pursues an ambitious agenda for economic development that will, in theory benefit the broader public."*³

"Di Afrika dan Asia, dominasi partai tunggal seringkali memiliki justifikasi sebagai upaya melindungi persatuan nasional, dan efeknya untuk melindungi masyarakat dari mereka sendiri dengan mengurangi ancaman dari persaingan etnik atau kesukuan atau dengan kata lain untuk membebaskan pemerintahan dari pertengkaran yang beranekaragam dalam rangka mencapai agenda pembangunan ekonomi yang akan memberi manfaat kepada publik secara luas."

Dapat dipahami bahwa rezim otoritarian partai tunggal memiliki ciri-ciri dominasi partai tunggal di dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pengawasan terhadap segala tindakan/aktifitas politik dalam rangka menjaga ketentraman sosial untuk menghindari kekacauan politik akibat kondisi sosial yang multi etnis sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

3. Rezim otoritarian militer yaitu *"governed by an officer or retired officer, with the support of the military establishment and some routine mechanism for high level officers to influence policy choice and appointment."*⁴

"dipimpin oleh pejabat atau pensiunan (militer) yang mendapatkan dukungan dari militer dengan beberapa mekanisme rutin dari pejabat tinggi untuk mempengaruhi pilihan kebijakan dan perjanjian."

Latar belakang pemimpin rezim yang berasal dari militer serta mendapatkan dukungan dari militer di dalam menjalankan kekuasaannya, di sisi lain militer mengambil peranan penting di dalam mempengaruhi setiap kebijakan dan perjanjian yang dikeluarkan/dibuat oleh pemerintahan.

Disamping teori penggolongan rezim otoritarian, dari segi aspek ekonomi peranan negara di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disebut sebagai *"state autonomy,"* yaitu kombinasi dari "kapasitas" dari negara untuk mengejar kebijakan pembangunan dengan "pembatasan" dari tekanan-tekanan tertentu, khususnya kepada organisasi yang berasal dari perusahaan dan serikat

¹Jay Ulfeder, "Contentious Collective Action and the Breakdown of Authoritarian Regimes," *International Political Science Review* (2005), Vol 26, No. 3, hlm. 315-319, saya akses melalui web <http://www.jstor.org/stable/30039035> diakses pada: 04/05/2011 06:20

² Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-*

Communist Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. Hlm. 52-53.

³ Jay Ulfeder, Op.Cit., hlm. 317.

⁴ Barbara Geddes, "Authoritarian Breakdown: Empirical Test of a Game-Theoretic Argument." Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Atlanta, GA. 1999. Hlm. 20.

pekerja.¹ Keberhasilan *state autonomy* di dalam mendorong pembangunan ekonomi didasarkan kepada, pertama negara memainkan peranan untuk membantu fungsi ekonomi berjalan secara efisien dan kedua, negara harus dilindungi dari tekanan swasta apabila menghendaki negara dapat menjalankan fungsinya dengan baik.²

Negara dianggap sebagai institusi yang dapat mengatasi dilema di dalam masyarakat (multi-etnis) dengan membatasi perilaku kepentingan pribadi dari suatu kelompok melalui sanksi, dimana dilema tersebut dapat diatasi dengan perintah/komando.³ Hal ini disebabkan sistem politik otoritarian memberikan elit politik sebuah otonomi dari tekanan distribusional, memberikan kesempatan negara untuk dapat meningkatkan kemampuan pemerintah untuk menyerap sumber daya, menyediakan pelayanan publik, dan menentukan beban jangka pendek yang diasosiasikan sebagai pengaturan ekonomi yang efisien.⁴ Hal ini pula yang menyebabkan seringkali pemerintahan diktator (otoriter) memiliki kemungkinan besar untuk dapat bertahan apabila mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di negaranya.⁵

Berdasarkan kerangka teori diatas maka di dalam melihat rezim otoritarian di Singapura dapat digolongkan ke dalam sistem rezim otoritarian dengan partai tunggal yaitu dengan berkuasanya *People's Action Party* (PAP) dan bersifat *closed authoritarian*⁶. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Singapura tidak terlepas dari peranan sentral pemerintahan dengan melakukan sistem ekonomi komando yang tidak hanya memudahkan distribusi dan alokasi pemerataan hasil pembangunan namun juga memudahkan negara di dalam menjaga keamanan dan ketentraman sosial.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat memahami mengapa Singapura tetap mempertahankan model *soft-authoritarian* meskipun tuntutan demokrasi di tengah arus Globalisasi menjadi isu penting di setiap Negara dunia saat ini.

Sehingga penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi Negara-negara dunia ke-tiga di Asia Tenggara khususnya, bahwa system pemerintahan *soft-authoritarian* model Singapura dapat menjadi alternatif model system politik ketika system demokrasi dalam politik justru menimbulkan kemunduran.

2. Pembahasan

“Bukanlah hal terpenting apakah kucing itu berwarna hitam atau putih, asalkan selama ia dapat menangkap tikus maka itu bukanlah masalah”

Deng Xiao Ping

Pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan yang pesat yang telah dicapai oleh negara Singapura, berdampak pada lahirnya kelas menengah yang memiliki pendidikan dan kualitas kehidupan yang lebih baik, namun tidak mendorong terjadinya demokratisasi di dalam kehidupan politik negara dan kehidupan masyarakat secara luas.

Sistem otoritarian dalam banyak hal justru dirasakan oleh elit politik dan masyarakat Singapura itu sendiri masih dipertahankan sebagai sistem pemerintahan yang berkesesuaian dengan kepentingan nasional di dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan masyarakatnya. Jika di belahan negara dunia lain seperti di Amerika Latin, Timur Tengah dan bahkan negara tetangganya sendiri yaitu Indonesia, rezim otoritarian menemukan akhir dari kekuasaannya namun tidak di Singapura.

Francis Fukuyama mengkategorisasikan sistem pemerintahan Singapura sebagai “soft authoritarian” yaitu didasarkan kepada dua premis:⁷ **pertama**, pemerintahan Singapura mengkombinasikan sistem ekonomi yang berorientasi pasar, dengan “semacam sistem otoritarianisme paternalistik yang bersifat persuasif daripada bersifat koersi”. **Kedua**, “soft authoritarian” adalah bersifat komunitarian yaitu menekankan kepada persesuaian kepada kepentingan kelompok terhadap kepentingan individu, disini terlihat pengaruh konfusian sebagai nilai-nilai moral yang dominan yang melihat kebutuhan dari masyarakat sebagai kepentingan yang lebih utama daripada kebebasan individu dan pembatasan oleh pemerintahan. Hal ini senada dengan pemikiran **Lee Kuan Yew** yang mengatakan bahwa “(*konfusianisme*) sebagai nilai inti kebudayaan (Singapura) dimana dinamisme kebudayaan konfusianis turun maka akan berdampak pada penurunan perekonomian (Singapura)”.⁸

Di Singapura yang memiliki latar belakang sosial yang terdiri dari multikultural, multibahasa, multiras, multiagama dimana seluruh populasi rakyat Singapura adalah pendatang/imigran mengharuskan pemerintahan Singapura memilih suatu sistem otoritarian sebagai pilihan yang rasional dan tepat untuk menghindari konflik

¹ Ronald Dore, “Scholars and Preachers.” *IDS Bulletin*, Sussex, United Kingdom: International Development Studies, Juni 1978. Hlm. 3-4.

² Adam Prezowski & Fernando Limongi, “Political Regimes and Economic Growth”, *Journal of Economic Perspectives*, Volume 7, No.3, Summer 1993, hlm. 56.

³ Pranab Bardhan, “Symposium on the State and Economic Development.” *Journal of Economics Perspectives*, Summer 1990, hlm. 5.

⁴ Stephan Haggard, *Pathways From Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries*, Ithaca: Cornell University Press, 1990. Hlm.262.

⁵ Adam Prezowski, “Democracy and Economic Development”, di dalam buku Edward D. Mansfield and Richard Sisson (ed.), *Political Science*

and The Public Interest, Columbus: Ohio State University Press, 2000. Hlm. 5.

⁶ Mekanisme pergantian kepemimpinan tidak melalui pemilu yang kompetitif. Lihat Marc Morje Howard & Phillip G. Roessler, “Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes”, *American Journal of Political Science*, Vol. 50, No. 2, April 2006, hlm. 367.

⁷ Francis Fukuyama, “Asia Soft-Authoritarian Alternative”, *New Perspective Quarterly*, Volume 9. No.2 hlm. 60-61.

⁸ “Chinese Culture Outside China Changing with The Generations”, *Sunday Times*, 11 Agustus 1991, hlm.21.

sosial dan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

Proses pembangunan politik diarahkan dengan melihat kebutuhan untuk merubah stagnansi ekonomi menjadi dinamis dan pembangunan yang mapan dan berkesinambungan, sehingga kondisi sosial dan politik yang stabil memainkan peranan yang menentukan dalam memacu atau memfasilitasi percepatan pendapatan perkapita.¹ dan oleh sebab itu pembangunan politik Singapura diartikan sebagai kebijakan politik dari Negara yang bisa memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Hal ini didasarkan oleh pemikiran para elit politik Singapura yang melihat bahwa tidak semua negara memiliki syarat-syarat dan kondisi yang sesuai dengan demokrasi 'barat', seperti stabilitas politik, tingkat pendidikan yang tinggi dan pembanguan ekonomi yang mapan, tanpa adanya prasyarat tersebut demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan, dan yang dibutuhkan oleh Singapura adalah pemerintahan yang baik.²

Pandangan para elit politik Singapura tersebut melihat demokrasi adalah ibarat seperti buah yang manis dan sehat namun untuk dapat menghasilkan buah seperti itu hanya bisa dihasilkan oleh tanaman yang memiliki syarat batang yang besar, akar yang kuat dan tanah yang subur. Dengan kata lain apabila demokrasi adalah buah, maka kestabilan politik, pembangunan ekonomi dan pendidikan yang baik masing-masing adalah batang, akar dan tanah.

Sehingga diperlukan landasan fundamental yang baik dan mapan untuk bisa menjalankan model demokrasi 'barat'. Menjadi tidak memungkinkan bagi demokrasi 'barat' dapat dijalankan apabila di dalam negara terjadi kekacauan politik, ketidakmerataan distribusi kekayaan, pengangguran yang besar dan krisis ekonomi yang akut.

Kemampuan negara di dalam menjalankan fungsi ekonomi menjadi faktor utama rezim 'soft-otoritarian' Singapura dapat bertahan di dalam era globalisasi.³ Pemerintahan Singapura mengetahui bahwa meskipun rakyat Singapura dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, namun hal ini demi kebaikan dan kepentingan nasional rakyat Singapura itu sendiri.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew bahwa "*So what if a few laws are slightly irritating? It is bit irritating to use condom too but does one want to get AIDS?*"⁴ ("lantas kenapa apabila beberapa hukum (membuat) sedikit terasa tidak nyaman? Memang sedikit tidak nyaman untuk memakai pengaman namun adakah orang yang mau terkena AIDS").

Beberapa kebijakan pemerintahan Singapura yang bersifat membatasi kebebasan rakyat Singapura dapat dilihat dari pengawasan pers yaitu pers haruslah sebagai

pemberi informasi atas kebijakan pemerintahan bukan mengkritik pemerintahan.⁵

Begitu pula kebijakan pemerintahan terkait National Security Action (NSA) yang memberikan otoritas kepada kepolisian dan imigrasi untuk menangkap dan menginterogasi orang-orang yang dianggap 'mencurigakan', namun menurut Lee Kuan Yew bahwa hal ini merupakan kebijakan guna melindungi rakyat Singapura dari ancaman seperti salah satunya perdagangan NARKOBA, dan buktinya masyarakat Singapura bisa merasakan aman berjalan di malam hari namun tidak untuk masyarakat Amerika yang mengatakan sistem demokrasi mereka adalah yang terbaik namun ribuan masyarakatnya terbunuh di jalan.⁶

Pemerintahan juga bertindak di dalam mensensor program penayangan yang dianggap membahayakan kohesifitas dan penyelewengan orientasi seksual seperti tayangan film homoseksual.⁷

Beberapa pembatasan yang dilakukan serta sanksi yang diterapkan kepada siapa saja yang melanggar aturan tersebut diimbangi oleh kebijakan pemerintahan Singapura yang 'memanjakan' rakyatnya. Jika banyak negara gagal di dalam menjalankan manajemen pelayanan publik, Singapura berhasil mengembangkan manajemen kebijakan publik yang baru (NPM).⁸

Pemerintahan Singapura memahami bahwa wilayah negaranya yang kecil menjadikan permasalahan tanah/lahan merupakan hal yang krusial, sehingga kepemilikan tanah sangat dibatasi untuk menghindari spekulasi tanah, kebijakan ini berdampak pada 85% populasi rakyat Singapura memiliki tempat tinggal dengan harga yang terjangkau.⁹

Kebijakan pemerintahan lainnya yaitu dengan menyediakan fasilitas listrik dan air yang gratis, peningkatan fasilitas transportasi dan sarana hiburan/rekreasi sehingga masyarakatnya nyaman dan membuat keyakinan di mata masyarakat Singapura bahwa kebebasan politik tidak lebih penting daripada fasilitas dan kualitas kehidupan yang terus meningkat.

3. Kesimpulan

Keberhasilan rezim 'soft-authoritarian' Singapura di dalam menjalankan fungsi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat yang disertai peningkatan kualitas pelayanan publik seperti perumahan, transportasi, air, listrik, tempat rekreasi dan hiburan, yang mendorong tidak hanya kepuasan dikalangan masyarakat Singapura namun juga disertai peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang meningkat tidak

¹ Lucian W. Pye, *The Political Development*, hlm.33

² Denny Roy, "Singapore, China, and The "Soft Authoritarian" Challenge", *Asian Survey*, Vol. XXXIV, No. 3, Maret, 1999, hlm. 232

³ lihat Sarosh Kuruvilla, "Linkages Between Industrialization Strategies and Industrial Relations/Human Resource Policies: Singapore, Malaysia, The Philippines, and India", *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 49, No. 4 (July 1996). Hlm.637

⁴ "Do We Want S'pore or Some Other Place?" *Straits Times*, 28 Mei 1988, hlm. 24.

⁵ Media's Role "To Inform People of Govt Policies," *Straits Times (overseas edition)*, 16 Juni 1990, hlm. 2.

⁶ Cao Yunhua, "Singapore As a Role Model," *Sunday Times*, 12 April, 1992, hlm. 22.

⁷ Garry Rodan, "Singapore in 2004: Long-Awaited Leadership Transition", *Asian Survey*, Vol. XLV, No. 1, Januari 2005, hlm. 142.

⁸ M. Shamsul Haque, "Governance and Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications", *International Political Science Review* (2004), Vol 25, No. 2, hlm. 228.

⁹ Bae-Gyoon Park, "Where Do Tigers Sleep at Night? The State's Role in Housing Policy in South Korea and Singapore", *Economic Geography*, Vol. 74, No. 3 (Jul., 1998), hlm.274

hanya memperbaiki kualitas kehidupan masyarakatnya namun juga meningkatkan produktivitas dari bangsa.

Teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mapan akan membuat rezim otoriter dapat bertahan terutama apabila dapat menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global yaitu yang berorientasi pasar.

Singapura menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak harus melalui sistem demokrasi model 'barat' karena tidak semua negara memiliki kondisi yang sama seperti di 'barat' contohnya masyarakat yang multi-etnis, multi-agama, multiras, multibahasa di negara paskakolonial apabila menerapkan demokrasi model 'barat' akan timbul kekacauan politik dan negara tersebut tidak akan mampu berkembang ke arah negara maju/modern.

Ungkapan Rousseau yang terkenal yaitu "*people cannot live with bread alone*" yang menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa hidup hanya dengan terpenuhinya kebutuhan 'perut' namun juga adanya kebutuhan lainnya seperti kebebasan berbicara dan berpolitik.

Namun di dalam kasus masyarakat Singapura yang tidak protes/demonstrasi terhadap perluasan hak politik disebabkan pemerintahan tidak hanya memberikan 'roti' atau kebutuhan 'perut' namun juga kebutuhan hiburan dan rekreasi yang membuat masyarakat nyaman.

Daftar Pustaka

- [1] Haggard, Stephan. 1990, *Pathways From Periphery: The Politics of Growth in the Newly Industrializing Countries*, Ithaca: Cornell University Press
- [2] Huntington, P. Samuel. 2000, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti
- [3] Linz, J. Juan. and Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- [4] Mansfield, Edward D and Richard Sisson (ed.), 2000, *Political Science and The Public Interest*, Columbus: Ohio State University Press.
- [5] Pye, W. Lucian. *The Political Development*
- [6] Jay Ulfeder, "Contentious Collective Action and the Breakdown of Authoritarian Regimes," *International Political Science Review* (2005), Vol 26, No. 3, hlm. 315-319, saya akses melalui web <http://www.jstor.org/stable/30039035> diakses pada: 04/05/2011 06:20
- [7] Bae-Gyoon Park, "*Where Do Tigers Sleep at Night? The State's Role in Housing Policy in South Korea and Singapore*", *Economic Geography*, Vol. 74, No. 3 (Jul., 1998)
- [8] M. Shamsul Haque, "Governance and Bureaucracy in Singapore: Contemporary Reforms and Implications", *International Political Science Review* (2004), Vol 25, No. 2
- [9] Garry Rodan, "Singapore in 2004: Long-Awaited Leadership Transition", *Asian Survey*, Vol. XLV, No. 1, Januari 2005
- [10] Sarosh Kuruvilla, "Linkages Between Industrialization Strategies and Industrial Relations/Human Resource Policies: Singapore, Malaysia, The Philippines, and India", *Industrial and Labor Relations Review*, Vol. 49, No. 4 (July 1996).
- [11] Denny Roy, "Singapore, China, and The "Soft Authoritarian" Challenge", *Asian Survey*, Vol. XXXIV, No. 3, Maret, 1999
- [12] Francis Fukuyama, "Asia Soft-Authoritarian Alternative", *New Perspective Quarterly*, Volume 9, No.2
- [13] Marc Morje Howard & Phillip G. Roessler, "Liberalizing Electoral Outcomes in Competitive Authoritarian Regimes", *American Journal of Political Science*, Vol. 50, No. 2, April 2006
- [14] Pranab Bardhan, "Symposium on the State and Economic Development." *Journal of Economic Perspectives*, Summer 1990
- [15] Adam Prezowski & Fernando Limongi, "Political Regimes and Economic Growth", *Journal of Economic Perspectives*, Volume 7, No.3, Summer 1993
- [16] Barbara Geddes, "Authoritarian Breakdown: Empirical Test of a Game-Theoretic Argument." Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Atlanta, GA. 1999
- [17] Ronald Dore, "Scholars and Preachers." *IDS Bulletin*, Sussex, United Kingdom: International Development Studies, Juni 1978
- [18] Do We Want S'pore or Some Other Place?" *Straits Times*, 28 Mei 1988
- [19] Media's Role 'To Inform People of Govt Policies,'" *Straits Times (overseas edition)*, 16 Juni 1990
- [20] Cao Yunhua, "Singapore As a Role Model," *Sunday Times*, 12 April, 1992
- [21] "Chinese Culture Outside China Changing with The Generations", *Sunday Times*, 11 Agustus 1991